

# **Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk Meningkatkan *Civic Disposition* Siswa**

**Oleh**

**(Nur Shelina, Hermi Yanzi, Ana Mentari)**

*This research aimed to describe and analyze the role of civic education learning in shaping the democratic attitude to increase civic disposition students in Senior High School 4 Kotabumi. The method used a descriptive method with a quantitative approach. The population was 680, and the samples were taken by 10% amounting to 68 students. Data collection techniques were using polls. Data analysis techniques were using a percentage formula, simple regression and double regression processed with SPSS applications. Result showed there was a role of learning civic education in shaping the democratic attitude to increase the civic disposition students in Senior high School 4 Kotabumi.*

**Keywords:** *civic education learning, democratic attitude, civic disposition*

# **Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk Meningkatkan *Civic Disposition* Siswa**

**Oleh**

**(Nur Shelina, Hermi Yanzi, Ana Mentari)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 680 siswa, dengan sampel diambil sebesar 10% berjumlah 68 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase, regresi sederhana dan regresi ganda diolah dengan aplikasi SPSS. Hasil yang didapat menunjukkan adanya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi.

**Kata Kunci:** *Peran Pembelajaran PPKn, Sikap Demokratis, Civic Disposition*

## PENDAHULUAN

Sikap demokratis sangatlah diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama serta kelompok-kelompok sosial. Keberagaman ini merupakan suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang ataupun kelompok pasti memiliki perbedaan yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok sosial dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda. Berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat kalau dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, sejahtera yang dilandasi dengan keadilan dan keberadaban (Zamroni, 2013:97).

Penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada bisa menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah (Azra, 2002:157). Melalui pendidikan, generasi muda bisa membentuk dan menumbuh kembangkan sikap demokratis untuk diterapkan dalam kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis, karena sikap demokratis sangat

diperlukan bagi masyarakat saat ini. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga dan bangsa atas ide, cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat yang demokratislah dimungkinkan warga dan bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan bersama. Namun, banyak sekali masyarakat kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa kasus remaja atau pelajar tahun 2018 melakukan aksi anarkis seperti tawuran pelajar, *bullying*, dan lain-lain naik 1,1% sampai bulan September 2018. Pada tahun 2017 angka menunjukkan hanya 12,9%, tetapi tahun 2018 ini mencapai 14%. Berikut data berdasarkan klaster perlindungan anak KPAI dalam pendidikan dari tahun 2011 sampai 2016.

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru mata pelajaran PPKn, juga guru Bimbingan Konseling yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Kotabumi, masih banyak ditemui siswa yang kurang menerapkan nilai-nilai demokratis di sekolah. Kurangnya sikap percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat saat proses pembelajaran berlangsung adalah salah satu masalah yang ditemukan. Adanya perasaan malu dan takut salah merupakan penyebab dari kurang percaya dirinya siswa dalam mengemukakan pendapat. Masalah lain yang ditemukan yaitu kurangnya motivasi pada siswa dalam berorganisasi maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Penyebabnya yaitu karena adanya rasa malas jika harus berlama-

lama disekolah, dan juga takut akan bersosialisasi. Lalu kurangnya pemahaman siswa dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis, yaitu adanya beberapa siswa yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ketua OSIS pada bulan September 2018 lalu. Dan juga peran mata pelajaran PPKn yang belum maksimal dalam membentuk sikap demokratis siswa.

Seharusnya pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa harus sudah memiliki sikap demokratis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa negara ini merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sehingga siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah harus mengerti dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demokrasi dan menjadi warga negara yang cerdas dan juga berkarakter.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang menunjang agar dapat menumbuhkembangkan karakter dan nilai-nilai demokratis pada siswa di sekolah. Siswa harus bisa membentuk sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kelas, di organisasi maupun kegiatan di luar sekolah. Bangsa Indonesia membutuhkan warga negara yang memiliki sikap demokratis yang baik, yang diajarkan sejak dini. Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki tujuan agar setiap warga negara Indonesia mampu menjadi *good & smart citizen*. *Good & smart citizen* harus memiliki sikap demokratis untuk meningkatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang ada dalam diri. Nilai-nilai

demokrasi dengan *civic disposition* sangatlah berkaitan dengan erat.

Karakter kewarganegaraan atau watak kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan karakter atau watak yang dikembangkan dari karakteristik kewarganegaraan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu agar karakter yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kewarganegaraan sehingga dapat menjadi *good & smart citizen* yang demokratis. *Civic disposition* ialah sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum (Fusnika, 2014:52). Tujuan karakter kewarganegaraan dikembangkan supaya siswa sebagai masyarakat yang mengerti dan paham untuk menjadi warga negara yang berkarakter. Sehingga *civic disposition* dapat berperan secara efektif ketika berada dalam masyarakat, berdemokrasi dalam memajukan bangsa dan negara, dan juga dapat menjadi warga negara yang bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sangat berperan penting dalam membentuk sikap demokratis pada siswa agar dapat meningkatkan *civic disposition* sebagaimana menjadi warga negara yang baik yang dapat berdemokrasi di dalam masyarakat secara efektif. Sikap demokratis dapat dibentuk dari berbagai aktivitas dikelas, aktivitas dalam berorganisasi, aktivitas di sekolah dan juga dalam diri siswa itu sendiri. Siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi masih banyak yang belum terbentuk sikap demokratis pada dirinya sehingga *civic disposition* dalam dirinya masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai

faktor yang telah peneliti observasi sebelumnya. Hasil observasi yang didapat adalah kurang kepercayaan diri pada siswa dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran PPKn, kurangnya motivasi dalam berorganisasi dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kurangnya pemahaman dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis, serta peranan pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa untuk meningkatkan *civic disposition* siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk meningkatkan *Civic Disposition* Siswa SMA Negeri 4 Kotabumi”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembelajaran PPKn berperan dalam membentuk sikap demokratis siswa?
2. Apakah pembelajaran PPKn berperan dalam meningkatkan *civic disposition* siswa?
3. Apakah pembelajaran PPKn berperan dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi pada Tahun Ajaran 2018/2019.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa.
2. Peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan *civic disposition* siswa.
3. Peran Pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**

#### **1. Pembelajaran**

Pembelajaran adalah suatu proses dimana seseorang belajar untuk mendapatkan ilmu dan berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Pembelajaran merupakan suatu usaha yang diberikan oleh pendidik untuk peserta didik agar terjadi proses mendapatkan ilmu pengetahuan, juga pembentukan sikap pada peserta didik.

Menurut Degeng (dalam Uno, 2009:2) pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Pengertian ini secara implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Senada dengan pernyataan sebelumnya, Dimiyati & Mudjiono (dalam Murdiono, 2012:20) mengemukakan bahwa pembelajaran merujuk pada terjadinya proses belajar mengajar. Belajar merupakan proses internal siswa dan pembelajaran merupakan kondisi eksternal siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya atau proses membelajarkan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menurut Zamroni (dalam Taniredja, 2013:2) pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awarenes, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Chamim (dalam Aryani & Susatim, 2010:40) mengemukakan bahwa: Pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia berarti pendidikan pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, serta demokratis.

## 3. Pembelajaran PPKn

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara yaitu pancasila. Menciptakan proses pembelajaran PPKn yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inspiratif, interaktif, dalam pembelajaran PPKn tidaklah mudah.

Sebagian besar siswa masih menganggap mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang hanya mementingkan hafalan saja. Guru dalam proses pembelajaran hanya menuntut kemampuan kognitif siswa saja.

Secara garis besar, peran pembelajaran PPKn ini diupayakan agar dapat mempersiapkan peserta didik memiliki kepribadian yang mantap, yaitu membantu peserta didik agar memiliki sikap menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PPKn diberikan nilai-nilai bagaimana bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan pancasila.

Menurut Azra (dalam 2015:8) dalam konteks pendidikan formal, keberadaan pendidikan kewarganegaraan melalui pola-pola pembelajaran yang humanis dan demokratis merupakan salah satu cara yang amat dibutuhkan masyarakat saat ini, di mana nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya (*genuine democracy*) dapat dipraktikkan di ruang-ruang kelas. Sehubungan dengan itu, pendidikan kewarganegaraan harus memiliki komponen-komponen dalam proses pembelajarannya, salah satunya yaitu pendekatan pembelajaran.

## 4. Pengertian Sikap Demokratis

Sikap merupakan bentuk dari kepribadian seseorang dalam kehidupan sosialnya, karena setiap pribadi pasti memiliki sikap tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Sikap sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, karena sering kita jumpai jika seseorang tinggal dalam lingkungan yang baik, maka ia akan memiliki sikap yang baik, dan juga sebaliknya.

Dalam menjadi *good citizenship*, sikap yang harus dimiliki ialah sikap

demokratis. Menurut Goldman (Zamroni, 2013:46) demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menekankan kepada prosedur yang memungkinkan warga bangsa mengendalikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan. Kemudian Diarsih (2015:27) menyatakan bahwa, demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis, dimana perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi.

### 5. *Civic Disposition*

*Civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang dinilai dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang bermartabat dan bertanggung jawab. Quigley (1991:4; Winataputra, 2012:58) menyatakan *civic disposition* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Kemudian Branson (1998:11) menyatakan *civic disposition* merupakan sifat atau ciri dari karakter publik dan privat yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan demokrasi. Seperti *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan ini berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu dan sebagai hasil dari apa yang kita pelajari di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan konsep-konsep dari satu variabel dengan variabel yang lainnya dengan angka. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta menunjukkan tentang peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 680 siswa, dengan sampel diambil sebesar 10% berjumlah 68 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase, regresi sederhana dan regresi ganda diolah dengan aplikasi SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Pembelajaran PPKn (X) dalam Membentuk Sikap Demokratis (Y<sub>1</sub>)

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis melalui perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa secara empiris hipotesis mengenai adanya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dapat dibuktikan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji *t*/parsial yang diperoleh yaitu  $t_{hitung}$  sebesar  $3,244 > t_{tabel}$  sebesar  $1,66827$  dan probabilitasnya (sig.) ternyata  $0,002 < 0,05$ . Besarnya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis sebesar 13,7% yang diperoleh dari hasil koefisien korelasi sikap demokratis sebesar 0,371.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya peran signifikan pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi sebesar 13,7% dan 86,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor peran lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian untuk variabel sikap demokratis menunjukkan, yang termasuk kategori tidak berperan sebesar 12% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn tidak berperan secara optimal sehingga menyebabkan masih adanya siswa yang belum memiliki sikap demokratis, seperti malas dalam mengemukakan pendapat, tidak berminat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan belum mengamalkan nilai-nilai demokratis yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sebagai warga negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, siswa masih menganggap bahwa pembelajaran PPKn hanyalah sebatas materi pelajaran dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kategori cukup berperan sebesar 59% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn cukup berperan dalam membentuk sikap demokratis pada siswa, seperti mengamalkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, berani dalam mengemukakan pendapat dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Para siswa sudah mulai terbiasa untuk mengamalkan nilai-nilai demokratis yang didapat melalui pembelajaran di kelas. Akan tetapi, siswa hanya melakukan dalam konteks yang tidak rutin atau kadang-kadang, hanya sebatas mengikuti teman, ataupun hanya tidak ingin mengurangi nilai sikap dan nilai mata pelajaran di sekolah.

Kategori berperan sebesar 29% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn berperan dalam membentuk sikap demokratis siswa secara optimal, sehingga menyebabkan perubahan sikap yang dimiliki oleh siswa yaitu sadar akan pentingnya menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara yang demokratis. Siswa menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapat, semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, aktif dalam berdiskusi, dan mengamalkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dan penjelasan dari siswa dan guru SMA Negeri 4 Kotabumi, yaitu dalam menunjang dan menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran PPKn terdapat inovasi yang lebih terkini sehingga membuat siswa dapat lebih mengerti mengenai materi yang diajarkan. Guru PPKn juga mengajarkan dalam proses belajar kepada para siswa untuk berani dalam mengemukakan pendapat, memberikan penjelasan bahwa mata pelajaran PPKn bukan hanya materi semata, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa juga menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran telah memakai strategi dan metode pembelajaran yang inovatif, walaupun belum diterapkan di semua kelas. Keterbatasan fasilitas yang belum semuanya memakai alat bantu seperti LCD, audio, dan sebagainya menjadikan proses pembelajaran PPKn yang seharusnya dapat sangat optimal menjadi sedikit terhambat. Akan tetapi, peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi terlaksana dengan cukup optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran pembelajaran PPKn mempunyai peran yang cukup optimal sebesar 59% dalam membentuk sikap demokratis dan 13,7% dari koefisien korelasi sikap demokratis pada siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi.

Sikap demokratis dapat dimiliki oleh setiap warga negara khususnya siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi apabila dalam proses pembelajaran PPKn lebih menerapkan metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan juga strategi pembelajaran yang lebih inovatif agar menarik siswa untuk lebih paham bagaimana menerapkan materi yang ada pada pembelajaran. Selain itu, juga dapat diperoleh dari pemberian contoh perilaku yang menggambarkan sikap demokratis seperti pengalaman dalam berorasi yang demokratis untuk pemilihan ketua osis, berorganisasi yang aktif dan kreatif, dan juga dari pengalaman yang diperoleh dari lingkungan masyarakat.

Upaya pembentukan sikap demokratis pada siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi yang utama ialah dimulai dari proses pembelajaran PPKn yang harus dilakukan sesuai dengan komponen-komponen yang disusun dan diterapkan dalam proses pembelajaran secara optimal sehingga mewujudkan salah satu tujuan dari PPKn yaitu menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Peran Pembelajaran PPKn (X) dalam Meningkatkan Civic Disposition (Y<sub>2</sub>)**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis melalui perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa secara empiris hipotesis mengenai adanya peran pembelajaran PPKn dalam

meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dapat dibuktikan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t/parsial yang diperoleh yaitu  $t_{hitung}$  sebesar  $2,775 > t_{tabel}$  sebesar  $1,66827$  dan probabilitasnya (sig.) ternyata  $0,007 < 0,05$ . Besarnya peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan *civic disposition* sebesar 10,5% yang diperoleh dari hasil koefisien korelasi sikap demokratis sebesar 0,323. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya peran signifikan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi sebesar 10,5% dan 89,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor peran lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengertian dari Permendiknas diatas, pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat penting dengan pelaksanaan yang optimal agar dapat meningkatkan watak kewarganegaraan atau *civic disposition* pada siswa agar generasi penerus bangsa bisa menjaga dan meningkatkan demokrasi bangsa dan negara.

Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel *civic disposition* menunjukkan yang termasuk dalam kategori tidak berperan sebesar 6% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn tidak berperan secara optimal sehingga menyebabkan masih adanya *civic disposition* siswa yang belum meningkat, hanya menganggap bahwa pembelajaran PPKn sebatas materi saja, hanya cukup untuk dipelajari dan tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kategori cukup berperan sebesar 24% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn cukup berperan dalam meningkatkan *civic disposition* siswa, siswa menjadi lebih menghargai orang

lain, tidak membeda-bedakan dalam berteman, mulai disiplin terhadap diri sendiri, dan memiliki toleransi terhadap perbedaan agama dan suku antar sesama.

Kategori berperan sebesar 70% menyatakan bahwa peran pembelajaran PPKn berperan secara optimal dalam meningkatkan *civic disposition* sehingga menyebabkan siswa memiliki keadaban yang baik seperti sopan terhadap orang tua maupun guru, lalu disiplin terhadap diri sendiri seperti dapat membagi waktu antara belajar dan bermain, berpakaian rapi, tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu, lalu dapat menerima setiap masukan ide dari orang lain tanpa memandang rendah orang lain, tidak membeda-bedakan dalam berteman, menghormati setiap perbedaan antar sesama dan selalu menolong teman yang mendapat musibah tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan wawancara dan penjelasan siswa dan guru PPKn SMA Negeri 4 Kotabumi dalam menunjang dan menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mengatakan bahwa pembelajaran PPKn berperan secara optimal dalam meningkatkan *civic disposition*. Optimalnya peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan *civic disposition* pada siswa ini dilihat dari proses pembelajaran yang mengajarkan untuk menghormati sesama warga negara yang memiliki perbedaan, memberikan gambaran bagaimana menjadi warga negara yang memiliki harkat dan martabat yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia, dan juga mengajarkan dalam berpartisipasi baik itu dikehidupan masyarakat maupun kehidupan berdemokrasi.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran PPKn

memiliki peran yang penting dalam meningkatkan *civic disposition* dilihat dari besarnya peran pembelajaran dalam meningkatkan *civic disposition* sebesar 70% dan dilihat dari perhitungan koefisien korelasi terhadap *civic disposition* sebesar 32,3%. Pembelajaran PPKn yang baik dan terencana akan dapat mewujudkan salah satu tujuan dari pembelajaran PPKn yakni dapat meningkatkan *civic disposition* siswa. Peningkatan *civic disposition* pada warga negara khususnya siswa sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis, karena untuk memiliki kehidupan yang demokratis harus dimulai dari warga negaranya. Menjadi warga negara yang memiliki *civic disposition* yang tinggi tidaklah mudah, maka dari itu diperlukan proses pembelajaran, pengalaman dan pendalaman dimulai sejak dini yaitu melalui pembelajaran PPKn. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan *civic disposition* pada siswa khusus di SMA Negeri 4 Kotabumi sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang demokratis.

### **3. Peran pembelajaran PPKn (X) dalam Membentuk Sikap Demokratis (Y<sub>1</sub>) untuk Meningkatkan Civic Disposition (Y<sub>2</sub>)**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis simultan melalui perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa secara empiris hipotesis mengenai adanya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dapat dibuktikan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian dengan uji F yang diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6,669 > F_{tabel}$  sebesar 3,98 dengan nilai probabilitasnya atau

signifikasinya (sig.) sebesar  $0,002 < 0,05$ . Nilai koefisiensi determinasi sebesar sebesar 0,170 atau 17%. Hal ini berarti pembelajaran PPKn mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi sebesar 17% dan sisanya 83% dipengaruhi oleh faktor peran lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembelajaran PPKn dapat diartikan sebagai usaha atau proses dalam membentuk siswa menjadi masyarakat yang demokratis, pembelajaran PPKn ini juga diupayakan agar dapat mempersiapkan peserta didik agar memiliki sikap menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PPKn diberikan nilai-nilai bagaimana bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan Pancasila. Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Azra (2015:8) yakni dalam konteks pendidikan formal, keberadaan pendidikan kewarganegaraan melalui pola-pola pembelajaran yang humanis dan demokratis merupakan salah satu cara yang amat dibutuhkan masyarakat saat ini, di mana nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya (*genuine democracy*) dapat dipraktikkan di ruang-ruang kelas.

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel yang menunjukkan bahwa peran pembelajaran PPKn yang termasuk dalam kategori kurang berperan yaitu komponen-komponen pembelajaran PPKn tidak diterapkan secara optimal, sehingga masih terdapat siswa yang belum memiliki sikap demokratis dan belum meningkatnya *civic disposition*, dan juga tidak mengerti bagaimana menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Kategori cukup berperan yaitu komponen-komponen pembelajaran PPKn sudah diterapkan secara cukup optimal, sehingga sebagian siswa sudah memiliki sikap demokratis dan *civic disposition* yang sudah mulai meningkat, seperti sudah tepat waktu datang ke sekolah, mulai mengamalkan nilai-nilai demokrasi, dan juga toleransi terhadap sesama teman. Kategori berperan yaitu komponen-komponen pembelajaran PPKn sudah diterapkan secara optimal sehingga hampir semua siswa telah memiliki sikap demokratis dan meningkatnya *civic disposition* untuk menjadi warga negara yang demokratis.

Berdasarkan wawancara dan penjelasan dari siswa dan guru SMA Negeri 4 Kotabumi dalam menunjang dan menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran PPKn sudah cukup optimal dilakukan dengan menggunakan pendekatan, strategi dan juga metode yang kreatif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena pada mulanya siswa memang kurang memiliki sikap demokratis dan masih belum memiliki *civic disposition* yang tinggi maka dengan pembelajaran PPKn ini dapat membentuk sikap demokratis dan meningkatkan *civic disposition* untuk menjadi warga negara yang demokratis.

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran yang penting dilihat dari perhitungan koefisiensi determinasi sebesar 17% dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dengan taraf signifikansi sebesar 98%. Pembelajaran PPKn yang tersusun secara baik dan terencana akan mampu

membentuk siswa sesuai dengan tujuan yang di inginkan yaitu memiliki sikap demokratis dan meningkatkan *civic disposition* siswa, baik dalam proses pembelajaran, dalam hal kerjasama, berpendapat, berpartisipasi, memiliki keadaban, disiplin terhadap diri sendiri, memiliki pikiran yang terbuka, dan juga toleransi terhadap perbedaan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam penelitian ini tidak hanya indikator-indikator pada penelitian ini yang berperan, tetapi ada peran lain yang berperan dalam membentuk sikap demokratis dan meningkatkan *civic disposition* pada siswa.
- 2) Penelitian ini lebih fokus terhadap instrument angket tertutup sehingga tidak dapat diberi tanggapan oleh responden.
- 3) Tidak didukung oleh wawancara dan dokumentasi, melainkan hanya sebagai penunjang dalam penelitian ini.
- 4) Responden kurang cermat dalam pengisian angket.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1) Adanya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi yang berkorelasi positif sebesar 0,137 yang berarti berkontribusi

sebesar 13,7%. 2) Adanya peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dengan koefisien determinasi sebesar 0,105 atau berkontribusi sebesar 10,5%. 3) Adanya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi dengan koefisien determinasi sebesar 0,170 atau berkontribusi sebesar 17%,

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryani, Ine Kusuma & Markum Susatim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Azra, Azyumardi. 2015. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenamedia Group
- Branson, S, Margaret. 1998. The Role of Civic Education. *Position Paper by The Communitarian Network*.
- Diarsih, Kadek. 2015. Pengaruh Partisipasi Pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Terhadap Sikap Demokratis Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3. No 4.
- Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Uno, Hamzah B. 2009. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*

*Dalam Perspektif Pendidikan Untuk  
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.*  
Bandung: Widya Aksara Press

Zamroni.2013. *Pendidikan Demokrasi  
pada Masyarakat Multikultural.*  
Yogyakarta: Ombak